BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI REFORMULASI KUALIFIKASI

DELIK UNTUK PERBUATAN KOHABITASI SEBAGAI UPAYA

PREVENTIF PERZINAHAN

A. Teori Pancasila

Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan keimanan kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing individu, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, toleransi, dan kebebasan beribadah tanpa memaksakan satu agama tertentu. Sila ini menjadi dasar moral dan spiritual dalam kehidupan bernegara, mencerminkan harmoni antara keberagaman agama dan keesaan Tuhan. Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menggarisbawahi pentingnya menghormati harkat dan martabat manusia, menjunjung kesetaraan, serta menghargai hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Sila ini mendorong sikap saling menghormati, keadilan sosial, dan perlakuan yang manusiawi dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua sila ini, sebagaimana dijelaskan dalam Piagam Jakarta (1945) dan Undang-Undang Dasar 1945 (khususnya Pembukaan dan Pasal 29 ayat 1 dan 2), menjadi fondasi filosofis yang mengikat keberagaman bangsa Indonesia dalam semangat persatuan dan keadilan (Utomo 2023).

Soepomo, salah satu perumus UUD 1945, dalam pidatonya di sidang BPUPKI (1945), yang termuat dalam Risalah Sidang BPUPKI-PPKI (1995, terbitan Sekretariat Negara), menegaskan bahwa sila pertama menjadi dasar

negara yang mencerminkan keimanan rakyat Indonesia, sementara sila kedua menekankan pentingnya keadilan dan kemanusiaan sebagai wujud negara yang beradab. Implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," dalam kehidupan beragama, sosial, budaya, dan hukum memiliki peran penting dalam mencegah praktik kohabitasi yang dapat mengarah pada perzinahan. Sila pertama menekankan pentingnya menjalankan ajaran agama yang mengatur hubungan antarmanusia, termasuk larangan mendekati zina sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (Surat Al-Isra ayat 32) dan nilai-nilai agama lain yang menjunjung kesucian perkawinan.

Sila kedua mendorong sikap saling menghormati dan menjaga martabat manusia melalui adab, seperti menjaga batasan dalam hubungan pria dan wanita di luar ikatan pernikahan. Dalam konteks hukum, Pasal 412 KUHP Nasional mengatur sanksi terhadap perzinahan, sementara Peraturan Daerah di beberapa wilayah di Indonesia juga memperkuat norma-norma moral untuk mencegah kohabitasi yang bertentangan dengan nilai budaya dan agama. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat menanamkan adab yang mencerminkan kemanusiaan yang beradab sebagai upaya preventif terhadap perzinahan, melalui pendidikan moral, penguatan institusi keluarga, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Teori Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia memberikan kerangka yang kuat untuk mereformulasi kualifikasi delik terhadap perbuatan kohabitasi. Pancasila menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan

persatuan, yang dapat diaplikasikan dalam konteks hukum untuk menciptakan regulasi yang lebih manusiawi dan responsif terhadap dinamika sosial. Dengan memahami kohabitasi sebagai fenomena yang semakin umum, perlu ada pendekatan hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendorong pemahaman dan pendidikan mengenai pentingnya institusi pernikahan dalam konteks masyarakat Indonesia.

Dalam upaya mencegah perzinahan, reformulasi kualifikasi delik untuk kohabitasi harus mempertimbangkan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila mengajarkan pentingnya dialog dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, melibatkan berbagai pemangku kepentingan—seperti tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan akademisi—dalam proses reformulasi sangat penting. Hal ini tidak hanya akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, tetapi juga mendorong kesadaran kolektif tentang nilai-nilai pernikahan dan komitmen dalam hubungan.

Selanjutnya, implementasi teori Pancasila dalam reformulasi ini juga harus mencakup aspek pendidikan dan rehabilitasi. Di samping sanksi hukum, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi dari kohabitasi dan perzinahan. Melalui program edukasi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan individu dapat menyadari pentingnya membangun hubungan yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, reformulasi ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada penciptaan lingkungan sosial yang mendukung nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan berkeluarga.

B. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat, yang mengatur tingkah laku individu berdasarkan hati nurani serta konsep baik dan buruk. Norma ini bersifat tidak tertulis, bersumber dari budaya, agama, dan tradisi, serta tidak memiliki sanksi formal, melainkan sanksi sosial seperti rasa malu atau dikucilkan. Sebaliknya, norma hukum adalah aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang, seperti undang-undang atau peraturan daerah, yang memiliki sanksi tegas seperti denda atau penjara. Dalam konteks kohabitasi, norma kesusilaan menekankan pentingnya menjaga kesucian hubungan di luar pernikahan berdasarkan nilai agama (misalnya, larangan zina dalam Al-Qur'an, Surat Al-Isra ayat 32), sedangkan norma hukum, seperti Pasal 412 KUHP Nasional, mengatur larangan perzinahan dengan ancaman pidana untuk melindungi tatanan sosial. Adami Chazawi menjelaskan bahwa tindak pidana perzinahan memerlukan pendekatan kebijakan hukum yang seimbang antara nilai moral dan kepastian hukum (Chazawi, 2016, hlm. 89).

Norma kesusilaan berperan penting dalam membentuk perilaku masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Norma ini mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, sopan santun, dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur, seperti menjaga batasan dalam hubungan antarlawan jenis untuk menghindari perzinahan. Dalam konteks kohabitasi, norma kesusilaan yang berakar dari ajaran agama dan budaya lokal, seperti adab dalam sila kedua

Pancasila, menjadi panduan untuk mencegah perilaku yang dianggap melanggar kesusilaan. Melalui pendidikan moral, dialog budaya, dan penguatan nilai keluarga, norma kesusilaan membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan menjunjung tinggi etika, sehingga mengurangi praktik kohabitasi yang dapat mengarah pada perzinahan. Dalam pembentukan hukum pidana, batasan antara norma kesusilaan dan kebebasan individu menjadi pertimbangan krusial untuk memastikan hukum tidak melanggar hak asasi manusia, sekaligus menjaga tatanan sosial. Norma kesusilaan, meskipun penting, tidak selalu dapat diterjemahkan langsung menjadi hukum pidana karena kebebasan individu dilindungi oleh konstitusi, seperti Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin perlindungan hukum yang adil (Drastawan 2022). Dalam kasus kohabitasi, hukum pidana seperti Pasal 412 KUHP Nasional atau peraturan daerah tertentu harus menyeimbangkan nilai kesusilaan masyarakat dengan hak individu untuk menentukan pilihan hidup, selama tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, upaya preventif perzinahan lebih efektif dilakukan melalui pendekatan persuasif, seperti edukasi moral dan agama, daripada hanya mengandalkan sanksi pidana, agar tidak membatasi kebebasan individu secara berlebihan sembari tetap menjaga nilai-nilai kesusilaan.

C. Nilai Etika sebagai landasan Moral dalam Hukum

Etika, sebagai cabang filsafat yang mengkaji prinsip benar dan salah dalam perilaku manusia, memainkan peran krusial dalam pembentukan hukum, terutama dalam konteks agama, sosial, dan moralitas. Etika berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengarahkan pembentuk hukum untuk menciptakan

aturan yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebajikan yang dianut masyarakat (Mahayuni 2019). Dalam dimensi agama, misalnya, etika berbasis ajaran spiritual seperti larangan zina dalam Al-Qur'an (Surat Al-Isra ayat 32) atau nilai kasih sayang dalam ajaran Kristen, menjadi dasar pembentukan hukum perkawinan yang menjunjung kesucian hubungan. Secara sosial, etika mencerminkan konsensus budaya, seperti pentingnya menjaga harmoni keluarga dan martabat individu, yang tercermin dalam norma-norma adat di Indonesia. Dengan demikian, etika menjadi fondasi moral yang memastikan hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga mencerminkan aspirasi keadilan masyarakat. Bambang Sujatmiko berpendapat bahwa reformasi hukum pidana harus mencakup isu kontemporer seperti kohabitasi untuk mencegah tindak pidana yang lebih berat (Sujatmiko, 2019, hlm. 78).

Konflik antara etika, moralitas, dan hukum sering muncul ketika nilai-nilai individu atau kelompok bertentangan dengan peraturan formal. Dalam kasus kohabitasi, misalnya, sebagian masyarakat mungkin memandangnya sebagai pilihan pribadi yang etis berdasarkan kebebasan individu, namun hal ini dapat bertentangan dengan moralitas agama yang menekankan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hubungan yang sah. Hukum positif, seperti Pasal 412 KUHP Nasional tentang perzinahan, mencerminkan upaya negara untuk menegakkan moralitas kolektif, tetapi sering kali dianggap kaku oleh kelompok yang memprioritaskan etika individualisme. Konflik ini diperparah oleh perbedaan interpretasi budaya, di mana beberapa komunitas adat mungkin mentoleransi kohabitasi dalam konteks tertentu, sementara hukum formal dan

agama menolaknya. Oleh karena itu, harmonisasi antara etika, moralitas, dan hukum memerlukan dialog lintas sektoral untuk menciptakan aturan yang adil dan diterima secara luas.

Dalam konteks kohabitasi, etika berperan sebagai panduan preventif untuk mencegah perzinahan melalui penguatan nilai-nilai moral dan hukum. Etika yang berakar pada agama, seperti ajaran Islam yang melarang mendekati zina (Al-Qur'an, Surat Al-Isra ayat 32), atau nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila sila kedua, mendorong individu untuk menjaga batasan dalam hubungan di luar pernikahan. Secara sosial, pendidikan etika melalui keluarga, sekolah, dan komunitas dapat membentuk kesadaran akan pentingnya komitmen perkawinan sebagai wujud tanggung jawab moral. Hukum, seperti Peraturan Daerah yang mengatur norma kesusilaan di beberapa wilayah Indonesia, memperkuat upaya preventif dengan memberikan sanksi bagi pelaku kohabitasi yang melanggar norma. Dengan mengintegrasikan etika, moralitas, dan hukum, masyarakat dapat membangun budaya yang menghormati kesucian hubungan, mengurangi risiko perzinahan melalui pendekatan preventif seperti konseling pranikah dan penegakan hukum.

D. Norma Budaya

Norma budaya memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap kohabitasi dan perzinahan. Di banyak kultur, terutama di negara-negara dengan tradisi kuat, pernikahan dipandang sebagai institusi sakral yang harus dihormati. Kohabitasi, yang sering kali dianggap

sebagai pelanggaran terhadap norma-norma ini, dapat menciptakan stigma sosial bagi pasangan yang memilih untuk hidup bersama tanpa ikatan resmi. Dalam konteks ini, reformulasi kualifikasi delik untuk perbuatan kohabitasi harus memperhatikan nilai-nilai dan norma budaya yang berlaku, agar hukum dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Pentingnya norma budaya dalam reformulasi ini terletak pada kemampuannya untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang dampak negatif dari kohabitasi terhadap institusi pernikahan. Dengan mengedepankan nilai-nilai tradisional yang mendukung pernikahan, hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencegah perzinahan. Misalnya, pendidikan hukum yang mengintegrasikan norma budaya dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi hukum dari kohabitasi dan memperkuat komitmen terhadap hubungan yang sah secara hukum. Hal ini dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih mendukung pernikahan sebagai pilihan utama.

Selain itu, reformulasi kualifikasi delik yang mempertimbangkan norma budaya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika hukum mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat, individu lebih cenderung mematuhi undang-undang tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kohabitasi dan perzinahan bisa lebih efektif, karena didukung oleh kesadaran dan dukungan sosial. Hal ini juga dapat mengurangi konflik antara hukum dan norma budaya, sehingga menciptakan harmoni dalam masyarakat. Akhirnya, reformulasi kualifikasi delik untuk perbuatan kohabitasi sebagai upaya preventif perzinahan tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum,

tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dengan menekankan pentingnya ikatan pernikahan dan mempromosikan norma-norma yang mendukungnya, reformulasi ini dapat membantu menciptakan iklim sosial yang lebih stabil dan harmonis. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat mengurangi angka perzinahan dan memperkuat institusi keluarga, yang merupakan pilar penting dalam kehidupan sosial.

E. Norma Agama

Norma agama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap isu kohabitasi dan perzinahan. Dalam banyak tradisi agama, seperti Islam, Kristen, dan Hindu, pernikahan dianggap sebagai sakramen atau ikatan suci yang harus dihormati. Kohabitasi, yang sering kali dilakukan tanpa ikatan pernikahan, dianggap melanggar ajaran agama yang menekankan pentingnya kesucian hubungan dan komitmen yang sah. Oleh karena itu, reformulasi kualifikasi delik untuk perbuatan kohabitasi perlu memperhatikan norma-norma agama ini agar hukum dapat sejalan dengan nilai-nilai spiritual yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Ketika hukum mengintegrasikan norma agama dalam reformulasi kualifikasi delik, hal ini dapat memperkuat kesadaran masyarakat tentang konsekuensi moral dan spiritual dari kohabitasi. Misalnya, banyak ajaran agama menekankan bahwa hubungan intim seharusnya hanya dilakukan dalam konteks pernikahan. Dengan menegaskan nilai-nilai ini dalam hukum, diharapkan masyarakat akan lebih menghargai pentingnya pernikahan dan menghindari praktik kohabitasi yang dapat berujung pada perzinahan. Edukasi

hukum yang berbasis pada nilai-nilai agama juga dapat membantu individu memahami bahwa tindakan mereka tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial tetapi juga pada kehidupan spiritual mereka.

Reformulasi kualifikasi delik yang memperhatikan norma agama juga dapat meningkatkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Ketika hukum mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, masyarakat lebih cenderung untuk mematuhi dan menghormati undang-undang tersebut. Hal ini akan menciptakan keselarasan antara hukum dan ajaran agama, sehingga mengurangi potensi konflik antara keduanya. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kohabitasi dan perzinahan dapat dilakukan dengan lebih efektif, karena didukung oleh pemahaman dan penerimaan masyarakat.

Akhirnya, pendekatan yang menggabungkan norma agama dalam reformulasi kualifikasi delik untuk kohabitasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegahan perzinahan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai moral di masyarakat. Dengan menegaskan pentingnya ikatan pernikahan berdasarkan ajaran agama, diharapkan masyarakat akan lebih mengambil langkah positif untuk membangun hubungan yang sehat dan bertanggung jawab. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil dan harmonis, di mana nilai-nilai agama dan hukum berjalan beriringan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik.